

**PENGARUH BELANJA MODAL, PERTUMBUHAN EKONOMI,  
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2007-2011**

**RENTA YUSTIE  
UNGGUL HERIQBALDI**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga Surabaya

**ABSTRAK**

*Belanja modal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 huruf c (Permendagri No. 13 Tahun 2006), digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja modal (PP RI No. 58 Tahun 2005) adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja modal yang besar diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011.*

*Pertumbuhan Ekonomi merupakan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur setiap tahun selama kurun waktu penelitian yaitu tahun 2007-2011 yang dinyatakan dengan satuan persen atas dasar harga konstan 2000. Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerjakabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011, yang dinyatakan dalam persen. Dalam hal ini diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat pengangguran terbuka yang rendah maka dapat menurunkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011.*

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinankabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011, dengan menggunakan metode panel.*

**Kata Kunci:** *Belanja Modal, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Metode Panel.*

**ABSTRACT**

*This thesis attempts to analyze the influence of capital expenditure, economic growth, and open unemployment rate toward the poverty rate in East Java Province during the year of 2007- 2011. Capital expenditure as decribed in Pasal 50 Letters C (Permendagri No. 13, 2006) is used for expenses in purchasing/ acqwasiting or constructing assets which valuable for more than twelve months on governments' activities such as; lands, equipments and machines, buildings, roads, irrigation networks, and other fixed assets. Meanwhile, Economic growth is defined as the annually change report in Gross Regional Domestic Product of districts or cities in East Java province during the research period from the year of 2007 – 2011 which reveals by a percent on the constant prices of 2000. Further, Open unempolymnt rate is the comparison data between the total number of unemployment and employee in districs or cities of East Java province from the year of 2007 -2011 which reveals in percentage. From the analysis, it is expected to find out that the high number of economic growth and a low unemployment rate are able to reduce the poverty of district or cities in East Java province partially and impartially at the year of 2007 – 2011. Here, Panel Methode is helpful to analyze such influences to reduce the poverty rate. Thus, in the future this thesis will give some informations and knowledges in order to improve the economic growth and reduce the number of unemployment and poverty in East Java province.*

**Keywords:** *Capital Expenditure, Open Unemployment Rate, Economic Growth, Poverty Rate, Panel Methode*

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Masalah perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur adalah masalah tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang terus dilakukan upaya untuk mengatasinya. Penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur masih ada yang hidup dalam kemiskinan dan menjadi penganggur. Tingginya tingkat kemiskinan dan tingginya tingkat pengangguran terbuka jika tidak segera diatasi akan menimbulkan penduduk miskin dan penganggur yang terus bertambah setiap tahun. Dampak yang ditimbulkan dari tingginya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yaitu rendahnya pendidikan dan tingginya kriminalitas (RPJPD Prov Jatim, 2005-2025). Menyadari hal tersebut maka prioritas kebijakan pembangunan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur diarahkan pada upaya pengurangan tingkat pengangguran terbuka, stabilisasi pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan (RKPD Provinsi Jawa Timur, 2011).

Pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk perencanaan pembangunan. Penyusunan anggaran tersebut ditata dalam suatu sistem anggaran yang gunanya untuk meningkatkan penyelenggaraan di daerah, baik tugas umum pemerintahan maupun pembangunan.

Belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang dialokasikan untuk pembangunan sektor publik, memiliki tujuan untuk penyerapan tenaga kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini berdasarkan fungsi pemerintah sebagai penyedia barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta dan mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. Pemerintah dalam hal ini sebagai *agent* distribusi pendapatan dan sebagai *agent* stabilisasi perekonomian untuk mengatasi tingkat pengangguran terbuka, inflasi dan tingkat kemiskinan serta stabilisasi pertumbuhan ekonomi (Guritno, 1995:3-9).

Perbedaan pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebagai konsekuensi dari pembangunan yang terkonsentrasi, beberapa daerah yang mengalami

kemajuan cukup cepat, sementara itu beberapa daerah mengalami kemajuan yang lambat dalam hal kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakatnya. Hal ini disebabkan kurangnya sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki dan kurangnya potensi dalam mengelola sumberdaya tersebut serta kurang tersedianya fasilitas yang mendukung pembangunan daerah (BPS Provinsi Jawa Timur, 2010).

Secara umum terjadinya pengangguran dapat disebabkan beberapa faktor antara lain: terbatasnya jumlah lapangan kerja yang tersedia, pertumbuhan penduduk yang relatif cepat, iklim usaha yang kurang kondusif, terjadinya pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri, kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang tidak linier dengan tingkat pendidikan yang dicapai, kecenderungan *urban oriented* dibanding *rural oriented*. Akibat dari tingginya tingkat pengangguran terbuka adalah ketidakstabilan sosial-ekonomi (RKPD Provinsi Jawa Timur, 2011:13).

Berbagai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi tingkat pengangguran terbuka antara lain meliputi (Pemprov Jawa Timur dan BPS Jawa Timur, 2008):

1. Perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan wirausaha baru (WUB) bagi angkatan kerja muda, penganggur dan setengah penganggur secara banyak dan produktif.
2. Penempatan tenaga kerja dengan mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Angkatan Kerja Khusus (AKSUS), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) melalui pola kerjasama atau kemitraan.
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).
4. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja.
5. Pengembangan hubungan industrial yang harmonis, adil dan bermartabat, perbaikan upah, syarat-syarat kerja serta peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh.
6. Peningkatan sumberdaya manusia aparatur untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pada masyarakat.

Hasil pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) bulan Agustus 2009, menunjukkan penurunan tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011.

Penurunan tingkat pengangguran terbuka disebabkan adanya pergantian musim pada sektor pertanian dan bangkitnya perekonomian. Bangkitnya perekonomian ditandai dengan pengembangan perumahan baru, pengembangan industri yang berdampak pada pengembangan sektor lain, pemberdayaan kerajinan rumah tangga, pelatihan tenaga kerja.

Upaya pemerintah daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dimulai dari bantuan dan perlindungan sosial rumah tangga miskin, pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) hingga penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Strategi utama penanggulangan tingkat kemiskinan yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur antara lain meliputi (Pemprov Jawa Timur dan BPS Jawa Timur, 2008):

1. Program pengembangan sumberdaya lokal berbasis kawasan
2. Pro poor award
3. Program peningkatan keberdayaan masyarakat
4. Lomba desa dan kelurahan
5. Pembangunan wilayah terpadu antar desa
6. Sistem informasi pendayagunaan profil desa dan kelurahan
7. Pendidikan kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas masyarakat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang membahas mengenai masalah belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka serta tingkat kemiskinan adalah:

1. Randall (2007) di Jepang, menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan dan pembangunan infrastruktur digunakan untuk memperbaiki kualitas tenaga kerja dan mengurangi pengangguran serta perbaikan upah untuk mengurangi kemiskinan, mengatasi ketimpangan pendapatan yang berkaitan pada terbentuknya kesejahteraan masyarakat.
2. Augustin (2010) di kawasan Asia, Eropa, Amerika dan Afrika pada tahun 1981-2005 yang menjelaskan mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah daerah untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan pada sektor publik dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan.

Pemulihan sebagai upaya menurunkan tingkat kemiskinan bersifat jangka panjang dengan cara penguatan kelembagaan, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi desa, peningkatan kemampuan sumberdaya manusia. Program yang dilakukan antara lain Program Gerdu-Taskin (Gerakan Terpadu-Pengentasan Kemiskinan) bertujuan untuk mengatasi kemiskinan melalui proses pemandirian masyarakat dan Program Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk mengembangkan perekonomian kawasan. Kendala dalam mengatasi kemiskinan masih dihadapi baik dari sisi pengelolaan maupun ketidak-pastian sasaran.

### Rumusan Masalah

1. Apakah belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011?
2. Apakah belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011?



3. Smith (2010) menjelaskan, bahwa perlu ada strategi dari pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan pada rumah tangga miskin dan anak-anak serta perbaikan sumberdaya manusia di Afrika. Strategi tersebut adalah perbaikan kualitas pendidikan, perluasan lapangan pekerjaan, bantuan sosial yang diberikan secara langsung pada rumah tangga miskin.
4. Fritzen (2002) mengenai pengurangan kemiskinan dan pengangguran di Vietnam menjelaskan bahwa pengangguran dan kemiskinan yang terjadi dipengaruhi oleh perbedaan tingkat upah desa dan kota, adanya peristiwa migrasi desa dan kota, langkah yang dilakukan pemerintah daerah yaitu dengan kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi hal tersebut berupa subsidi, bantuan langsung untuk rumah tangga miskin.
5. Werner (2007) di Brazil menjelaskan untuk meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan, mengatasi kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang dilakukan pemerintah daerah adalah meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah

untuk pendidikan, pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan, hasil penelitian dapat menurunkan angka koefisien gini, mengurangi persentase penduduk miskin dan mengurangi jumlah penganggur.

6. Sajid Anwar (1998) mengenai peningkatan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran di Australia tergantung dari tingkat upah, harga barang atau output tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah untuk atasi pengangguran dengan penyediaan lapangan pekerjaan dan perluasan kesempatan kerja.
7. Aloysius Gunandi Brata (2005) mengenai investasi sektor publik dan kemiskinan antar provinsi di Indonesia. Langkah yang dilakukan adalah melakukan pembuktian empiris mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap kemiskinan dan tingkat pembangunan manusia antar provinsi di Indonesia. Tujuannya untuk memperoleh bukti empiris hubungan antara pengeluaran pemerintah daerah terhadap kemiskinan dan tingkat pembangunan manusia antar provinsi di Indonesia.

### Landasan Teori

Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi, yaitu (Mangkoesobroto, 2001:170):

1. Tahap Awal  
Pada tahap ini diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, karena pemerintah harus menyediakan prasarana bagi keberlanjutan pembangunan negara.
2. Tahap Menengah  
Pada tahap ini investasi pemerintah masih tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat menuju tahap tinggal landas. Pada tahap ini peran investasi swasta juga semakin besar sehingga memungkinkan terjadi kegagalan pasar sehingga pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik yang lebih besar.
3. Tahap Lanjut  
Pada tahap ini pengeluaran pemerintah tetap diperlukan dan beralih dari penyediaan prasarana dan infrastruktur ke pengeluaran sosial untuk kesejahteraan masyarakat.

Hukum Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran

pemerintah akan meningkat (Mangkoesobroto, 1993:172). Kelemahan Hukum Wagner yaitu tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Menurut Peacock dan Wiseman terdapat tiga efek yang berhubungan dengan pengeluaran pemerintah, yaitu (Mangkoesobroto, 1993:173-174):

1. Efek Pengalihan (Displacement Effect)  
Efek yang timbul akibat adanya suatu gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Misalnya gangguan perang sehingga pemerintah menaikkan pajak, hal ini menyebabkan dana yang dimiliki oleh swasta untuk investasi dan konsumsi berkurang.
2. Efek Konsentrasi (Concentration Effect)  
Efek ini menjelaskan bahwa dengan adanya gangguan sosial akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi ke tangan pemerintah dengan sebagian kegiatan yang awalnya dilakukan oleh swasta.
3. Efek Inspeksi (Inspection Effect)  
Efek ini timbul karena adanya kesadaran masyarakat terhadap hal-hal yang perlu ditangani oleh pemerintah setelah selesainya gangguan sosial. Misalnya dalam hal pungutan pajak yang semakin meningkat.

Howard (2010:64-79) menjelaskan public expenditure ditentukan oleh perubahan permintaan barang publik, perubahan aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, dan perubahan kualitas barang publik serta perubahan harga-harga faktor-faktor produksi. Devarajan, Swaroop dan Sen (1996) menyatakan masing-masing kategori pengeluaran sebagai proporsi dari total anggaran, bukan jumlah absolut sehingga dengan mempertimbangkan batasan anggaran publik maka masing-masing kategori pengeluaran dapat ditingkatkan. Berbeda dengan Easterly dan Rebelo (1993) yang mengemukakan bahwa belanja modal publik memiliki efek negatif terhadap pertumbuhan, seperti pengeluaran publik pada transportasi dan komunikasi.

Analisis teori pertumbuhan ekonomi endogen dengan kemiskinan adalah berlakunya modal insani atau modal manusia sebagai faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi dari dalam yang bersifat endogen yang merupakan hasil dari keputusan berinvestasi. Teori Harrod-Domar menekankan pentingnya pembentukan modal dalam

menciptakan pertumbuhan ekonomi. Hubungan teori Harrod-Domar dengan kemiskinan menjelaskan bahwa penambahan modal dan tenaga kerja secara bersama-sama akan menghasilkan produksi dan pendapatan nasional. Kenaikan kapasitas produksi dan pendapatan nasional ditentukan oleh kenaikan pengeluaran masyarakat.

Fenomena antara pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan pendapatan yang menyebabkan kemiskinan diperkenalkan oleh Simon Kuznets, yang menjelaskan bahwa pembangunan di suatu negara pada batas-batas tertentu dapat memicu terjadinya kesenjangan ekonomi diantaraarganya. Kuznets menemukan kesenjangan pendapatan dengan pendapatan per kapita yang berbentuk kurva "U" terbalik, yang menyatakan bahwa pada awal tahap pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan kesejahteraan cenderung memburuk yang ditandai dengan kemiskinan yang tinggi. Tahap pertumbuhan berikutnya, distribusi pendapatan dan pendapatan per kapita membaik seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat sehingga kemiskinan berkurang (Arsyad, 2010:292).

Dualisme yang terjadi menurut Lewis adalah melihat perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri yang berjalan sementara, karena pada akhirnya tenaga kerja yang berpindah dari sektor pertanian ke sektor industri akan kembali lagi pada sektor pertanian. Penyebab kembalinya tenaga kerja dari sektor industri ke sektor pertanian karena tenaga kerja dari sektor pertanian tidak memiliki cukup keahlian yang dibutuhkan di sektor industri, pada umumnya tenaga kerja di sektor pertanian kualitas sumberdaya manusianya rendah. Sulitnya penentuan upah yang layak untuk tenaga kerja yang pindah dari sektor pertanian ke sektor industri, karena upah yang diberikan di sektor industri berdasarkan tingkat pendidikan dan keahlian, tetapi kenyataannya tenaga kerja dari sektor pertanian tidak memiliki tingkat pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan di sektor industri, hal ini yang menyebabkan tenaga kerja kembali lagi ke sektor pertanian.

Teori dualisme pembangunan Fei-Ranis menjelaskan suatu negara terbelakang yang kelebihan buruh dan disertai perekonomian yang miskin sumberdaya, dimana sebagian besar penduduknya bergerak di bidang pertanian di tengah pengangguran hebat dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi serta kemiskinan yang tinggi. Ekonomi pertanian berhenti yang sebagian besar orang bergerak di lapangan pertanian tradisional. Pembangunan terdiri dari

pengalokasian kembali surplus tenaga kerja di bidang pertanian yang sumbangannya terhadap output adalah nol atau dapat diabaikan ke sektor industri di mana tenaga kerja menjadi produktif dengan upah yang sama dengan upah di bidang pertanian (M.L. Jhingan, 2004:217).

Analisis Mill untuk mengatasi kemiskinan dengan pengendalian pertumbuhan penduduk golongan kelas pekerja. Mill meyakini bahwa pembatasan penduduk merupakan hal yang penting untuk memperbaiki kondisi kelas pekerja sehingga mereka dapat menikmati hasil kemajuan teknologi, akumulasi modal dan kesejahteraan pendapatan, Mill menyarankan adanya pembatasan kelahiran sebagai lawan dari moral (M.L. Jhingan, 2004:106).

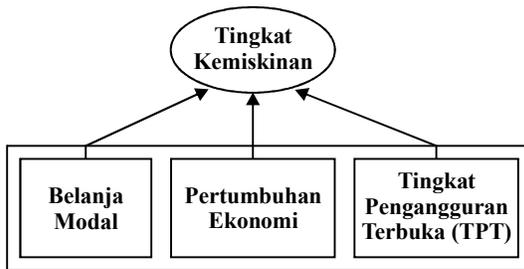
Analisis Hukum Okun dalam mengatasi kemiskinan melalui human capital investment sebagai cara untuk menurunkan tingkat pengangguran, hal ini membuat produktivitas tenaga kerja menjadi tinggi, yang secara langsung dapat meningkatkan daya beli masyarakat karena adanya kenaikan pendapatan per riil tenaga kerja yang merupakan langkah untuk mengatasi kemiskinan (Arsyad, 2010:133). Analisis Keynes untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui permintaan efektif yang menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan permintaan investasi.

Todaro (1998:7) menyatakan keterbelakangan penduduk negara berkembang terutama disebabkan karena tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyerapan tenaga kerja yang rendah, menyebabkan produktivitasnya rendah sehingga pendapatan rendah, hal ini mengakibatkan rendahnya standar kualitas hidup atau rendahnya tingkat hidup. Jhingan (2002) menyatakan pertumbuhan penduduk yang pesat suatu negara menyebabkan terjadinya kemiskinan, pertumbuhan penduduk benar-benar dianggap sebagai hambatan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang cepat mempersempit lahan dan memperberat tekanan pada lahan serta menyebabkan pengangguran sehingga memicu kemiskinan. Pertambahan pertumbuhan penduduk apabila dikurangi maka kemiskinan dapat dikurangi sehingga beban keluarga juga berkurang.

Konsep pembangunan menurut Malthus yaitu proses pembangunan ekonomi yang terjadi dengan sendirinya. Malthus menegaskan bahwa proses pembangunan adalah suatu proses naik dan turunnya aktivitas ekonomi, Malthus menitikberatkan pada perkembangan kesejahteraan yang dilihat dari pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi.

### III. KERANGKAKONSEPTUAL

#### Kerangka Konseptual



#### Model Analisis

$$Tk_{Kit} = \beta_0 + \beta_1 BM_{it} + \beta_2 PE_{it} + \beta_3 TPT_{it} + eit$$

### IV. METODE PENELITIAN

#### Rancangan Penelitian yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode kuantitatif dan pendekatan deskriptif.

#### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, melalui metode dokumenter. Data tersebut diseleksi dan disesuaikan dengan metode yang akan digunakan, metode yang digunakan adalah metode panel.

#### Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumenter yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, berbagai artikel, jurnal ilmiah dan hasil penelitian untuk dijadikan referensi. Data yang sudah ada disesuaikan selanjutnya diolah dan dianalisis baik secara kuantitatif dan kualitatif.

#### Teknik Analisis

##### a. Ordinary Least Square

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \dots + \beta_n X_{nit} + u_{it}$$

##### b. Fixed Effects Model

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_2 + \dots + \alpha_n D_n + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + u_{it}$$

##### c. Random Effects Model

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \epsilon_{it} + u_{it}$$

#### Pengujian Statistik

##### a. Uji $R^2$

Kegunaan dari uji  $R^2$  ini adalah untuk menunjuk-

#### Keterangan:

Tk = Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2007-2011

BM = Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2007-2011

PE = Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2007-2011

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2007- 2011

$\beta$  = Tingkat elastisitas kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat

eit = error term

i = Indikasi Data *Cross Section*

t = Indikasi Data *Time Serries*

kan apakah variabel independennya dapat menerangkan variabel dependennya dengan baik. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0-1. Suatu model *time series* apabila  $R^2$  mencapai angka 1 maka variabel independennya dapat menerangkan variabel dependen dengan sempurna. Sebaliknya apabila  $R^2$  mencapai angka 0 berarti variabel independennya tidak dapat atau lemah dalam menerangkan variabel dependen.

##### b. Uji F (secara bersama-sama)

Kegunaan uji  $F$  untuk menentukan signifikannya atau tidak signifikannya suatu variabel bebas secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel tidak bebas. Dalam hal ini ditetapkan sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_k = 0$$

$$H_1 : \text{paling tidak salah satu } \beta \text{ signifikan}$$

Jika hasil perhitungan ternyata  $F_0 (F_{hitung}) < (F_{tabel})$ , maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) ditolak. Bila terjadi keadaan demikian, dapat dikatakan bahwa variasi dari model regresi tidak berhasil menerangkan variabel bebasnya. Sebaliknya, jika  $F_0 (F_{hitung}) > (F_{tabel})$  maka dapat dikatakan hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima. Bila terjadi keadaan demikian dikatakan bahwa variasi dari model regresi dapat menerangkan variasi variabel bebasnya.

##### c. Uji t (parsial)

Fungsi uji t adalah untuk menentukan signifikansi suatu variabel bebas secara individual dalam mempengaruhi variabel tidak bebas. Dalam hal ini diterapkan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_1 : \beta_i \neq 0$$

Apabila  $t_0 (t_{hitung}) < (t_{tabel})$  maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) ditolak artinya model yang digunakan kurang baik, dengan kata lain variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel

terikatnya atau tidak signifikan. Sebaliknya jika  $t_0 (t_{hitung}) > (t_{tabel})$  maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya atau signifikan.

**V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

**Tabel 1**  
Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan Metode FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	22.05905	1.836674	12.01032	0.0000
BM	-0.288166	0.067516	-4.268139	0.0000
PE	-0.295956	0.240853	-1.228785	0.2211
TPT	0.299720	0.142598	2.101854	0.0372
Effects Specification				
Cross-Section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-Squared	0.907169			
Adjusted R-Squared	0.882248			
S.E. of regression	2.549891			
F-Statistic	36.40183			
Prob (F-statistic)	0.000000			
Durbin-Watson Stat	1.363127			

Sumber: hasil pengolahan Eviews

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan hasil estimasi persamaan regresi data panel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

$$TKK = 22,05905 - 0,288166BM - 0,295956PE + 0,299720TPT \dots\dots\dots(5.1)$$

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Hasil dari pengolahan data diperoleh nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) sebesar 0,907169. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan sebagai variabel terikat dalam model penelitian ini dapat dijelaskan sebesar 90,7169 % oleh variabel bebas dalam model penelitian yaitu belanja modal, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model pada penelitian sebesar 9,2831 %.

**Uji F (secara bersama-sama)**

Berdasarkan hasil perhitungan uji F diperoleh nilai F<sub>hitung</sub> sebesar 36,40183, sedangkan nilai F<sub>tabel</sub> sebesar 1,46 dengan numerator = 40 dan denominator = 149, dengan tingkat derajat keyakinan (α=5%). Angka dari hasil perhitungan menunjukkan F<sub>hitung</sub> > F<sub>tabel</sub>, sehingga menunjukkan Ho ditolak dan H<sub>1</sub> diterima dengan nilai probabilitas (F-statistik) sebesar 0,000000. Hasil ini

menunjukkan secara bersama-sama variabel bebas yaitu belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka, berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011.

**Uji t (parsial)**

Pembuktian hasil analisis regresi data panel secara parsial pada variabel bebas terhadap variabel terikat dengan tingkat derajat keyakinan (α=5%) dalam penelitian ini melalui koefisien parsial uji t dapat dilihat pada Tabel 2. berikut:

**Tabel 2.**  
Hasil Regresi Data Panel Uji t

Variabel Bebas	Prob t-statistik	Signifikansi (α=5%)
Belanja Modal (BM)	0,0000	Signifikansi (α=5%)
Pertumbuhan Ekonomi (PE)	0,2211	Tidak Signifikan (α=5%)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	0,0372	Signifikansi (α=5%)

Sumber: Hasil Perhitungan Eviews

**Pembahasan**

Berdasarkan pada uraian perhitungan hasil estimasi persamaan model regresi data panel dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) adalah sebesar 0,907169 yang memiliki arti bahwa variabel bebas yang terdiri dari belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan sebesar 90,7169 %, sedangkan sisanya sebesar 9,2831 % diterangkan oleh variabel-variabel selain variabel pada model dalam penelitian ini. Variabel bebas yang terdiri dari belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, sedangkan secara parsial variabel belanja modal dan tingkat pengangguran terbuka mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat dalam penelitian ini. Variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Hasil estimasi persamaan regresi data panel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

$$TKK = 22,05905 - 0,288166BM - 0,295956PE + 0,299720TPT \dots\dots\dots (5.2)$$

Variabel bebas belanja modal berpengaruh negatif terhadap variabel terikat, setiap kenaikan 1 ribu rupiah pada belanja modal maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 28,8166 %. Variabel bebas tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap variabel terikat, setiap kenaikan 1 % variabel bebas tingkat pengangguran terbuka akan menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 29,9720%.

Hasil estimasi pengaruh belanja modal pada APBD terhadap tingkat kemiskinan adalah signifikan. Koefisien variabel belanja modal memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan sebesar -0,288166. Pengaruh yang negatif dan signifikan menunjukkan pengaruh perubahan antara belanja modal pada APBD dengan tingkat kemiskinan. Peningkatan alokasi belanja modal pada APBD akan mengurangi tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur melalui sejumlah program mengatasi kemiskinan yang dibuat pemerintah daerah dengan menggunakan dana APBD pemerintah daerah setiap tahunnya.

Hasil estimasi pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil negatif, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi merupakan total *output* barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah pada periode waktu tertentu, untuk menghasilkan *output* barang dan jasa yang besar membutuhkan modal berupa peralatan, mesin dan tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Tenaga kerja yang berada pada proses produksi barang dan jasa sebagai tenaga

kerja yang produktif, balas jasa yang diperoleh tenaga kerja berupa pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Hasil estimasi tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan, menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dengan nilai sebesar 0,299720. Pengaruh positif disini menunjukkan jika tingkat pengangguran terbuka turun maka tingkat kemiskinan juga turun, dan sebaliknya. Hasil yang diharapkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di bawah rata-rata tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur sebesar 5,34%.

Pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Agustus tahun 2009, hampir tidak terlihat adanya dampak krisis ekonomi global terhadap tingkat pengangguran terbuka, karena tingkat pengangguran terbuka justru mengalami penurunan ketika terjadi krisis ekonomi global (RKPD Provinsi Jawa Timur, 2011). Diperkirakan pada kondisi krisis ekonomi, tenaga kerja melakukan mekanisme penyesuaian dengan cara mencari pekerjaan sampingan dan mempekerjakan anggota rumah tangga usia produktif, kondisi krisis ekonomi menunjukkan peranan signifikan sektor informal sebagai penyangga (*buffer*) perekonomian di kabupaten/kota (RKPD Provinsi Jawa Timur, 2011). Persyaratan lain seperti tingkat pendidikan, ketrampilan/keahlian dan kompetensi tenaga kerja masih rendah sedangkan disisi lain tuntutan dunia kerja akan kebutuhan tenaga kerja trampil, ahli dan kompeten semakin meningkat seiring dengan tuntutan perkembangan ekonomi global.



**VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

1. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Pengaruh signifikan penurunan tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur mampu memberikan respon pada penurunan tingkat kemiskinan. Belanja modal mampu menurunkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa

- Timur karena dengan belanja modal yang besar secara tidak langsung dapat menurunkan tingkat kemiskinan.
2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Penyebab pertumbuhan ekonomi tidak mampu memberikan respon pada penurunan tingkat kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi relatif masih belum cukup tinggi, pertumbuhan ekonomi tumbuh lambat di kawasan daerah kemiskinan,

relatif lemahnya keterkaitan sektor pertanian dengan sektor-sektor lainnya, relatif terkonsentrasinya pembangunan di daerah perkotaan.

3. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka yang ada pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur mampu memberikan respon pada penurunan tingkat kemiskinan. Penyebab tingkat pengangguran terbuka dapat menurunkan tingkat kemiskinan karena berkurangnya jumlah penganggur dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.
4. Belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011, berdasarkan hasil signifikansi uji F pada variabel belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

#### Saran

1. Belanja modal pada APBD kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tetap diperlukan untuk membiayai program-program menurunkan tingkat kemiskinan. Pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur dapat memperbesar pengeluaran belanja modal yang secara tidak langsung dapat menurunkan tingkat kemiskinan, memperbesar pengeluaran belanja modal pada pos:
  - i. Belanja modal alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan
  - ii. Belanja modal pengadaan peralatan industri
  - iii. Belanja modal pengadaan peralatan pendidikan
  - iv. Belanja modal pengadaan peralatan kesehatan
2. Pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan maka meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Cara yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas

pertumbuhan ekonomi agar dapat menurunkan tingkat kemiskinan yaitu:

- i. Mempercepat pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota dan daerah kawasan kemiskinan, dengan cara mengurangi tingkat pengangguran terbuka, melalui pertumbuhan ekonomi yang berorientasi padat tenaga kerja. Turunnya tingkat pengangguran terbuka meningkatkan *output* dan pendapatan, sehingga menurunkan tingkat kemiskinan.
  - ii. Meningkatkan keterkaitan antar sektor perekonomian pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Keterkaitan antar sektor perekonomian membutuhkan tenaga kerja sehingga timbul penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan meningkatkan *output* sektor perekonomian.
  - iii. Pemerataan pembangunan perekonomian pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur agar pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh lebih cepat di semua kabupaten/kota, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh lambat di daerah kawasan kemiskinan.
3. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan cara:
    - i. Memberikan pendidikan dan latihan kerja.
    - ii. Perluasan kesempatan kerja di dalam negeri dan ke luar negeri.
    - iii. Mengembangkan dan meningkatkan kegiatan wirausaha di dalam negeri, yang dibekali dengan pelatihan khusus dari instansi atau lembaga terkait, untuk dapat menghasilkan *output* yang dapat di ekspor ke luar negeri.
    - iv. Percepatan industrialisasi di sektor perekonomian dan di daerah pedesaan, supaya menyerap banyak tenaga kerja.

Menurunkan tingkat kemiskinan dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pemanfaatan sepenuhnya sumberdaya alam. Cara yang dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan adalah akumulasi modal manusia melalui pendidikan dan pelatihan, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui bantuan langsung dan pemberdayaan sumberdaya manusia khususnya masyarakat pedesaan, perbaikan dan pengembangan infrastruktur pedesaan sebagai modal fisik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, 2010, *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 5, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Augustin, Kwasi Fosu. *Inequality, Income and Poverty: Comparative Global Evidence*. December 2010, Vol. 91, Number. 5. Social Science Quarterly. Southwestern Social Science Association. United Nations University-Institute for Development Economic Research.
- BPS, 2008, *Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur*. Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- , 2010, *Analisis Indikator Makro Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur*. Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- Devarajan, S. Swaroop, Sen, 1996, *The Composition of Public Expenditure and Economic Growth*.
- Esterlo and Rebelo. S., 1993, *Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical Investigation*, *Journal of Monetary Economics* 32:417-458.
- Fritzen, Scott. *Growth, Inequality and Future of Poverty Reduction in Vietnam*. 2002. Journal of Asian Economic Public Policy Program, National University of Singapore.
- Guritno, 1995, *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE-Universitas Gadjah Mada.
- Howard, M., 2001, *Public Sector Economics for Developing Countries*. Barbados. University Of The West Indies Press.
- Jhingan, M.L., 2002, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- , 2004, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jones, S Randall. *Income Inequality, Poverty, Social Spending in Japan*. ECO/WKP (2007)16. Economics Department Working Papers No.556. Organisation for Economic Co-Operation and Development.
- Mangkoesebroto, Guritno. *Ekonomi Publik*. Edisi 3, 1993. Universitas Gadjah Mada. BPFE-Yogyakarta.
- , *Ekonomi Publik*. Edisi 3, 2001. Universitas Gadjah Mada. BPFE-Yogyakarta.
- Michael, P Todaro dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi*. 1998. Jakarta: Erlangga.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Provinsi Jawa Timur Tahun 2011.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah, Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.
- Sajid, A., 1998, *Size of the Government, Welfare and Labour Supply in the Presence of Variable Returns*. Darwin NT 0909, Australia. Faculty of Business, Northern Territory University.
- Smith, Noel. *Economic Inequality and Poverty: where do we go from here?*. Vol 30 Iss: 3 pp 127-139. Emerald Article. International Journal of Sociology and Social Policy.
- Werner. *Tax Burden, Government Expenditure and Income Distribution in Brazil*. 2008. The Quartely Review of Economics and Finance. Elsevier. University of illinois at Urbana-Champaign:US.